Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 11 Tahun 2026

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA BANYU LANGSE BERBASIS SEJARAH DAN POTENSI ALAM DI DESA BOTO

Alam Deny Kusuma[1] ,Tachya Darajatul Ulya[2], Neni Agustin[3], Mohamad Gufron[4], Ima Yuni Astika[5], Husni Umar Fadhilah[6], Dwi Nurul Hidayah[7], Yang vida maulida lailanaja[8], Sania Putri Setiya[9]
Institute Agama Islam Nahdlatul Ulama' Tuban
Email : alamdeni140503@gmail.com

ABSTRAK

Banyu Langse merupakan wisata air terjun di Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang memiliki kekuatan pada bentang alam, suasana perdesaan, tradisi lisan, serta peluang integrasi dengan produk lokal berbasis siwalan. Pengembangan destinasi memerlukan tata kelola, keselamatan pengunjung, interpretasi sejarah yang bertanggung jawab, keterlibatan masyarakat, dan pemasaran yang terukur. Kegiatan ini bertujuan mendampingi penyusunan strategi pengembangan Banyu Langse yang berbasis sejarah lokal dan potensi alam. Metode kegiatan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) melalui tahap Discovery, Dream, Design, dan Destiny/Deliver. Pelaksanaan mencakup telaah data sekunder, pemetaan aset, wawancara semi-terstruktur, diskusi aspirasi, analisis pemangku kepentingan, analisis SWOT, penyusunan rencana aksi, sosialisasi strategi, dan penyerahan dokumen strategi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pokdarwis dirintis sekitar 2014 dan pernah menjalankan penghijauan di kawasan Banyu Langse, tetapi kegiatan rutin berhenti sekitar 2020. Regenerasi pemuda, belum adanya agenda kerja, kerusakan bantuan perahu, dan ketidaksesuaian fasilitas menjadi masalah utama. Riwayat pengembangan kawasan juga menunjukkan pemanfaatan lokasi sejak 2012-2013 melalui kegiatan KKN, LDKS, perkemahan, dan pertemuan. Hasil pendampingan menghasilkan enam arah strategi, yaitu penguatan kelembagaan lokal, penataan keselamatan dan konservasi, dokumentasi sejarah dan tradisi lisan, pengembangan usaha warga, pemasaran digital berbasis narasi, serta kemitraan lintas pihak. Implementasi awal dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penyerahan dokumen strategi sebagai panduan pengembangan wisata. Artikel ini menyimpulkan bahwa Banyu Langse layak dikembangkan sebagai wisata alam berbasis masyarakat dengan memprioritaskan regenerasi kelembagaan, keselamatan, konservasi, dan keterlibatan warga.

Kata Kunci: Banyu Langse; Desa Boto; Asset-Based Community Development; wisata berbasis masyarakat; sejarah lokal; strategi pengembangan.

ABSTRACT

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism Checker No 234.KK.44.893484
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Banyu Langse is a waterfall attraction in Boto Village, Semanding District, Tuban Regency. Its main assets include the natural landscape, rural atmosphere, oral traditions, and opportunities to connect tourism with local palmyra palm products. Destination development requires accountable governance, visitor safety, responsible historical interpretation, community participation, and measurable marketing. This community engagement activity aimed to assist stakeholders in formulating a development strategy for Banyu Langse based on local history and natural potential. The activity applied Asset-Based Community Development (ABCD) through Discovery, Dream, Design, and Destiny/Deliver. The process included secondary data review, asset mapping, semi-structured interviews, aspiration discussions, stakeholder analysis, SWOT analysis, action planning, strategy dissemination, and delivery of the strategy document. The interviews found that the tourism awareness group was initiated around 2014 and had conducted greening activities in the Banyu Langse area, but routine activities stopped around 2020. Youth regeneration, the absence of a regular work program, damaged boat assistance, and mismatched facility support were the main issues. The history of the site also shows that it had been used since 2012-2013 for university community service activities, student leadership training, camping, and community meetings. The assistance process produced six strategic directions: strengthening local institutions, improving safety and conservation, documenting history and oral traditions, developing community businesses, conducting narrative-based digital marketing, and building cross-sector partnerships. Initial implementation included disseminating the strategy to the community and delivering the strategy document as a tourism development guide. The article concludes that Banyu Langse can be developed as a community-based nature destination by prioritizing institutional regeneration, safety, conservation, and meaningful community involvement.
***Keywords**: Banyu Langse; Boto Village; Asset-Based Community Development; community-based tourism; local history; development strategy.*

PENDAHULUAN

Banyu Langse berada di Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban pernah menggunakan kawasan ini sebagai lokasi kegiatan resmi pada 13 Februari 2019 dan menyebutnya sebagai Wahana Wisata Air Terjun Banyu Langse. Pemberitaan lokal menggambarkan daya tarik berupa aliran air, bebatuan, suasana alami, serta medan yang pada bagian tertentu sulit dan licin (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2019; BeritaBojonegoro.com, 2017). Informasi tersebut menunjukkan dua sisi yang harus dikelola

secara bersamaan. Daya tarik alam dapat menjadi alasan kunjungan, tetapi karakter batu, arus air, dan jalur yang licin menuntut pengelolaan risiko yang tegas.

Desa Boto memiliki basis demografis dan infrastruktur yang cukup untuk memulai pengembangan secara bertahap. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban (2024) mencatat luas Desa Boto 2,11 km^2. Jumlah penduduk pada 2023 mencapai 2.010 jiwa, terdiri dari 1.012 laki-laki dan 998 perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 952,61 jiwa per km^2. Desa ini berjarak sekitar 14 km dari ibu kota Kecamatan Semanding dan 11 km dari ibu kota Kabupaten Tuban. Jalan terluas berpermukaan aspal atau beton dan dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Angkutan umum tersedia tanpa trayek tetap. Kondisi tersebut memberi dasar aksesibilitas, tetapi belum menjamin akses terakhir menuju titik air terjun aman untuk semua kelompok pengunjung.

Infrastruktur digital juga memberi peluang pemasaran dan pendataan. Pada 2023, Desa Boto memiliki tiga menara telepon seluler dan dilayani empat operator. Kekuatan sinyal dikategorikan kuat dengan jenis sinyal 4G/LTE. Desa juga tercatat memiliki satu penginapan dan dua koperasi simpan pinjam aktif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2024). Data ini penting karena pemasaran destinasi kini tidak terpisah dari layanan informasi digital, pemesanan, ulasan pengunjung, peta daring, pembayaran, dokumentasi kegiatan, dan pencatatan jumlah kunjungan.

Prinsip destinasi berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pengelolaan, manfaat sosial ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Prinsip tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Di tingkat desa, pengembangan juga perlu terhubung dengan kewenangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Jika ditemukan benda, struktur, situs, atau indikasi tinggalan yang memenuhi kriteria cagar budaya, proses identifikasi dan penanganannya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penggunaan istilah sejarah dalam promosi tidak dapat menjadi dasar untuk menetapkan status cagar budaya secara sepihak.

Kegiatan pendampingan ini bertujuan menyusun strategi pengembangan Wisata Banyu Langse yang berbasis sejarah lokal dan potensi alam. Tujuan khususnya meliputi memetakan kondisi dasar desa dan destinasi, mengidentifikasi aset dan masalah prioritas, merumuskan posisi strategis melalui analisis SWOT, menyusun pembagian peran pemangku kepentingan, dan menghasilkan rencana aksi bertahap yang dapat dimasukkan ke dalam perencanaan desa. Artikel ini menggunakan hasil wawancara lapangan dengan pengurus Pokdarwis, pemuda, dan tokoh lokal sebagai sumber utama untuk memperbarui gambaran kelembagaan serta riwayat pengembangan Banyu Langse.

METODE PENELITIAN

Kegiatan dirancang sebagai pendampingan penyusunan strategi dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). ABCD menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan memulai perubahan dari kekuatan yang telah dimiliki, seperti aset alam, manusia, sosial, budaya, kelembagaan, dan infrastruktur, bukan hanya dari daftar masalah. Pendekatan

ini membantu masyarakat mengenali, menghubungkan, dan menggerakkan aset lokal untuk mencapai tujuan bersama (Kretzmann & McKnight, 1993). Dalam kegiatan ini, tahapan ABCD dioperasionalkan melalui Discovery, Dream, Design, dan Destiny/Deliver (Fauzi et al., 2024). Kerangka wisata berbasis masyarakat tetap digunakan untuk memastikan bahwa strategi menguatkan kapasitas warga, menjaga sumber daya, dan mendistribusikan manfaat secara wajar (Okazaki, 2008; Salazar, 2012).

Tahap Discovery atau menemukan aset dilakukan melalui telaah data sekunder, pemetaan lapangan, dan wawancara semi-terstruktur. Data desa diperoleh dari Kecamatan Semanding Dalam Angka 2024. Informasi mengenai keberadaan dan karakter umum Banyu Langse diperoleh dari situs Pemerintah Kabupaten Tuban, portal destinasi pemerintah daerah, dan media lokal. Pemetaan mencakup aset alam, manusia, sosial, budaya, kelembagaan, ekonomi, dan infrastruktur. Wawancara melibatkan anggota Kelompok Sadar Wisata yang banyak berasal dari pemuda dan karang taruna, Bapak Rifa'i selaku Ketua Pokdarwis, serta Bapak Kasrun selaku tokoh Banyu Langse. Catatan wawancara dikelompokkan berdasarkan tema dan dibandingkan dengan dokumentasi lapangan.

Tahap Dream atau membangun harapan bersama dilakukan melalui diskusi terarah dengan pengurus Pokdarwis, pemuda, tokoh lokal, dan unsur masyarakat. Hasil pemetaan aset disampaikan kembali untuk memperoleh konfirmasi. Peserta kemudian merumuskan kondisi Banyu Langse yang diharapkan, yaitu Pokdarwis yang aktif, keterlibatan pemuda yang berkelanjutan, kawasan yang aman dan lestari, fasilitas yang sesuai kebutuhan, sejarah lokal yang terdokumentasi secara bertanggung jawab, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan warga. Rumusan harapan bersama ini menjadi arah bagi penyusunan strategi.

Tahap Design atau merancang strategi dilakukan melalui analisis pemangku kepentingan dan analisis SWOT. Temuan Discovery dan rumusan Dream diterjemahkan menjadi enam strategi prioritas, yaitu penguatan kelembagaan, penataan keselamatan dan konservasi, dokumentasi sejarah, pengembangan usaha warga, pemasaran digital, serta kemitraan. Setiap strategi diuji memakai lima kriteria, yaitu dampak terhadap keselamatan, dampak terhadap lingkungan, manfaat bagi warga, kebutuhan biaya, dan kemudahan pelaksanaan. Hasilnya disusun menjadi rencana aksi 0 sampai 36 bulan dengan pembagian peran dan indikator awal.

Tahap Destiny/Deliver atau implementasi awal dilakukan melalui sosialisasi strategi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta penyerahan dokumen strategi kepada pemerintah desa dan Pokdarwis sebagai panduan pengembangan wisata. Sosialisasi membahas peta aset, harapan bersama, prioritas program, pembagian peran, tahapan waktu, dan indikator monitoring. Tindak lanjut awal diarahkan pada pengaktifan kembali Pokdarwis, verifikasi status lahan dan aset, audit risiko, pencatatan pengunjung, dokumentasi sejarah lisan, serta penataan informasi dasar. Pelaksanaan program lanjutan tetap menyesuaikan keputusan pemerintah desa dan kesepakatan warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Discovery (Menemukan Aset)

Tahap Discovery menghasilkan gambaran mengenai aset yang telah dimiliki Desa Boto dan kawasan Banyu Langse. Aset tersebut mencakup kondisi dasar desa, potensi alam, sejarah

dan tradisi lisan, pengalaman kelembagaan, keterlibatan pemuda, serta jaringan sosial yang dapat mendukung pengembangan wisata.

Profil Dasar Desa Boto dan Posisi Banyu Langse

Desa Boto merupakan salah satu desa di Kecamatan Semanding. Luas wilayahnya 2,11 km^2 atau sekitar 1,74 persen dari luas kecamatan. Pada 2023, jumlah penduduk mencapai 2.010 jiwa. Komposisi laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Desa memiliki 3 rukun warga dan 11 rukun tetangga. Data tersebut menunjukkan skala wilayah yang cukup ringkas untuk pendekatan pengelolaan berbasis komunitas. Namun, kepadatan penduduk yang cukup tinggi juga menuntut pengaturan ruang agar kegiatan wisata tidak mengganggu akses, privasi, ketenangan, dan aktivitas harian warga.

Boto berada sekitar 11 km dari ibu kota Kabupaten Tuban. Jalan utama desa berupa aspal atau beton dan dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Ketersediaan angkutan umum tanpa trayek tetap menunjukkan bahwa wisatawan masih perlu mengandalkan kendaraan pribadi, kendaraan sewa, ojek, atau pengaturan transportasi lokal. Strategi akses tidak harus dimulai dengan pembangunan jalan baru. Desa dapat memulai dengan penunjuk arah, titik turun, jalur pejalan kaki, informasi kondisi medan, pengaturan parkir, dan layanan antar lokal pada hari tertentu.

Infrastruktur digital Boto mendukung pengelolaan informasi. Tiga BTS, empat operator, dan sinyal 4G/LTE yang kuat memberi peluang untuk pencatatan kunjungan berbasis formulir daring, sistem pengaduan, promosi video pendek, peta digital, kode QR, dan survei kepuasan. Pengelola tidak perlu langsung membeli aplikasi mahal. Tahap awal dapat memakai akun resmi, Google Business Profile, formulir daring, lembar kerja bersama, dan nomor layanan yang dikelola dengan jadwal piket.

Tabel 2. Data Dasar Desa Boto yang Relevan bagi Pengembangan Wisata

Indikator	Data 2023	Implikasi strategis
Luas wilayah	2,11 km^2	Pengelolaan dapat memakai skala komunitas, tetapi perlu pengaturan ruang dan jalur
Penduduk	2.010 jiwa	Tersedia basis sumber daya manusia dan pasar lokal
Kepadatan	952,61 jiwa per km^2	Perlu mengendalikan gangguan wisata pada permukiman
Jarak	14 km dari ibu kota kecamatan dan 11 km dari ibu kota kabupaten	Cukup dekat untuk pasar perjalanan singkat

Indikator	Data 2023	Implikasi strategis
Jalan utama	Aspal atau beton, dapat dilalui roda empat sepanjang tahun	Akses desa cukup, sedangkan akses terakhir harus diaudit
Angkutan umum	Ada, tanpa trayek tetap	Perlu layanan informasi dan opsi antar lokal
Akomodasi	1 penginapan	Dapat diaudit dan dihubungkan dengan paket wisata
Jaringan digital	3 BTS, 4 operator, sinyal kuat 4G/LTE	Mendukung promosi, pencatatan, pembayaran, dan survei digital
Koperasi simpan pinjam	2 unit aktif	Berpotensi mendukung pembiayaan mikro dengan tata kelola yang hati-hati

Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban (2024).

Pemetaan Potensi Alam

Potensi alam Banyu Langse terletak pada hubungan antara air, batu, vegetasi, kontur, dan suasana perdesaan. Nilai destinasi tidak hanya berada pada satu titik air terjun. Pengalaman pengunjung dimulai sejak memasuki desa, melihat lanskap, berjalan menuju lokasi, berinteraksi dengan warga, menikmati produk lokal, dan memahami cerita tempat. Karena itu, penataan harus memakai konsep koridor pengalaman, bukan membangun satu objek foto yang terpisah dari lingkungan.

Risiko utama mencakup terpeleset, jatuh, terseret aliran, batu lepas, pohon atau ranting tumbang, cuaca ekstrem, dan keterlambatan pertolongan. Pengelola perlu membuat daftar bahaya, menilai kemungkinan dan tingkat dampak, lalu menetapkan pengendalian. Pengendalian paling efektif bukan hanya memasang papan. Pengelola juga perlu menutup titik berbahaya, membuat batas aman, melatih petugas, menentukan ambang debit atau hujan, menyiapkan komunikasi darurat, dan mencatat insiden serta kejadian nyaris celaka.

Konsep ketahanan sosial ekologis menilai kemampuan komunitas dan lingkungan untuk beradaptasi tanpa kehilangan fungsi utama. Ruiz-Ballesteros (2011) menunjukkan bahwa wisata berbasis masyarakat perlu dibaca sebagai bagian dari sistem sosial ekologis. Untuk Banyu Langse, fungsi utama mencakup aliran air, kestabilan lereng, vegetasi, akses warga, hubungan sosial, dan ruang ekonomi. Strategi yang meningkatkan kunjungan tetapi merusak salah satu fungsi tersebut tidak dapat disebut berhasil.

Pemetaan Sejarah, Tradisi Lisan, dan Legenda

Sejarah dapat menjadi pembeda destinasi, tetapi penggunaannya memerlukan disiplin sumber. Informasi yang beredar tentang Banyu Langse dan kawasan sekitarnya mencakup cerita perjalanan tokoh agama, pertemuan di lokasi tertentu, asal nama, pantangan, dan legenda. Cerita tersebut mempunyai nilai budaya karena menunjukkan cara masyarakat memberi makna

pada ruang. Namun, nilai budaya tidak sama dengan bukti sejarah. Tim pendamping perlu menghindari kalimat promosi yang menyatakan peristiwa tertentu pasti terjadi jika belum ada arsip, artefak, kajian, atau sumber yang dapat diuji.

Hasil dokumentasi dapat dibagi menjadi tiga label. Label pertama, fakta terdokumentasi, digunakan untuk informasi yang memiliki sumber jelas. Label kedua, tradisi lisan masyarakat, digunakan untuk ingatan yang diwariskan dan diakui oleh beberapa informan tetapi belum memiliki bukti tertulis yang cukup. Label ketiga, legenda lokal, digunakan untuk cerita simbolik, mitologis, atau pantangan. Panel interpretasi harus mencantumkan label tersebut. Cara ini menjaga daya tarik cerita tanpa menyesatkan pengunjung.

Wisata warisan membutuhkan keterhubungan antara tempat, narasi, dan identitas. Poria et al. (2003) menunjukkan bahwa pengalaman warisan terbentuk ketika pengunjung melihat tempat sebagai bagian dari warisan yang bermakna. Salazar (2012) mengingatkan bahwa pariwisata budaya berbasis komunitas menghadapi peluang sekaligus ancaman, termasuk penyederhanaan budaya demi pasar. Karena itu, warga harus memegang hak untuk menyetujui cerita yang dipublikasikan, menentukan batas informasi sakral atau privat, dan memperoleh manfaat dari kegiatan interpretasi.

Tabel 3. Kerangka Verifikasi Narasi Sejarah Banyu Langse

Kategori Narasi	Kriteria	Cara Penyajian
Fakta terdokumentasi	Didukung arsip, dokumen resmi, peta, foto bertanggal, kajian, atau bukti yang dapat diperiksa	Cantumkan sumber, tahun, dan batas informasi
Tradisi lisan	Diceritakan lintas informan atau generasi, tetapi bukti tertulis belum memadai	Gunakan frasa menurut penuturan warga atau dalam tradisi lisan setempat
Legenda lokal	Mengandung unsur simbolik, mitologis, pantangan, atau tokoh yang tidak dapat diverifikasi	Sajikan sebagai legenda, jelaskan nilai moral atau fungsi sosialnya
Informasi belum terverifikasi	Beredar di media sosial atau percakapan tanpa sumber jelas	Jangan dijadikan klaim promosi sebelum proses verifikasi

Hasil Wawancara Lapangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Boto tumbuh dari kesadaran warga terhadap potensi wisata desa. Kelompok ini banyak melibatkan pemuda dan unsur karang taruna. Pokdarwis mulai dirintis sekitar 2014. Bang Kirno menjadi ketua pada periode awal, kemudian terjadi pergantian kepengurusan. Pak Hartono disebut sebagai salah satu penggagas karena melihat potensi Desa Boto sebagai tujuan wisata. Ruang kerja Pokdarwis tidak hanya terbatas pada Banyu Langse. Kelompok juga bergerak pada penghijauan dan penguatan lingkungan desa. Salah satu informan menyampaikan, *"Pokdarwis tidak hanya berfokus pada Banyu Langse. Kegiatannya juga bisa berupa penghijauan, seperti*

penanaman bibit kelengkeng dan jambu di rumah warga. Pengelolaan Banyu Langse harus melibatkan desa dan warga." (Wawancara dengan anggota Pokdarwis Desa Boto).

Program yang paling diingat ialah penghijauan di kawasan Banyu Langse melalui penanaman kelengkeng, jambu, matoa, dan mahoni. Kegiatan terakhir tercatat sekitar 2020, sedangkan pada 2026 belum terdapat agenda baru. Regenerasi menjadi tantangan karena banyak pemuda yang telah selesai sekolah lebih fokus mencari pekerjaan. Keanggotaan dinilai "gampang-gampang angel" karena partisipasi sulit dijaga secara konsisten. Informan juga menjelaskan bahwa pemerintah pernah memberikan bantuan perahu, tetapi sarana tersebut telah rusak. Menurut kelompok, bantuan yang lebih dibutuhkan ialah gazebo atau fasilitas istirahat. Informan menyatakan, *"Kegiatan yang paling berhasil adalah penghijauan di area Banyu Langse. Terakhir ada agenda sekitar tahun 2020. Bantuan perahu pernah diberikan, tetapi sekarang sudah rusak. Kebutuhan yang lebih sesuai sebenarnya gazebo."* (Wawancara dengan anggota Pokdarwis Desa Boto).

Bapak Rifa'i, Ketua Pokdarwis, menjelaskan riwayat awal pengembangan kawasan. Ia mulai melihat potensi lokasi sejak membeli lahan di wilayah puncak pada 2011. Pembangunan pondasi dimulai pada 12 Desember 2012 dan lokasi mulai dibuka sekitar April 2013. KKN Universitas PGRI Ronggolawe menjadi salah satu kegiatan awal yang memperkenalkan kawasan melalui acara penutupan KKN. Setelah itu, lokasi digunakan untuk LDKS, perkemahan, dan pertemuan. Peserta datang tidak hanya dari Tuban, tetapi juga dari Gresik dan Mojokerto. Ia menyampaikan, *"Saya melihat potensi tempat ini sejak 2011. Pondasi mulai dibangun 12 Desember 2012, lalu sekitar April 2013 mulai dibuka. Setelah KKN Unirow masuk, tempat ini dipakai untuk LDKS, kemah, dan pertemuan sampai sekarang."* (Wawancara dengan Bapak Rifa'i, Ketua Pokdarwis).

Dalam pengelolaan vegetasi, mahoni dipilih karena dinilai tetap bertahan pada musim hujan dan musim kemarau. Bibit dicari dari Montong, Merakurak, Semanding, dan jaringan pengelola mangrove melalui Pak Mansur. Bapak Rifa'i juga menegaskan, *"Lahan ini tidak dijual."* Bapak Kasrun sebagai tokoh Banyu Langse ikut memberikan keterangan lokal dalam proses wawancara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Banyu Langse memiliki riwayat panjang, tetapi kelembagaan, regenerasi, dan penentuan prioritas program masih perlu ditata. Potensi Desa Boto mencakup wisata alam, budaya, dan kuliner. Pengembangan perlu dimulai dari satu prioritas yang paling siap agar sumber daya tidak terpecah.

Gambar 1. Wawancara lapangan dengan anggota Pokdarwis dan pemuda Desa Boto.

Gambar 2. Wawancara dengan pengurus Pokdarwis dan tokoh masyarakat Desa Boto.

Gambar 3. Diskusi kelompok mengenai potensi dan pengelolaan Wisata Banyu Langse.

Gambar 4. Dokumentasi wawancara mengenai sejarah pengembangan Banyu Langse.

Sumber: Dokumentasi lapangan.

Tabel 5. Ringkasan Tema dan Respons Strategis dari Wawancara

Tema	Temuan lapangan	Respons strategis
Sejarah kelembagaan	Pokdarwis dirintis sekitar 2014. Bang Kirno menjadi ketua awal dan Pak Hartono disebut sebagai penggagas.	Dokumentasikan riwayat, susunan pengurus, dasar penugasan, dan mekanisme pergantian kepengurusan.

Tema	Temuan lapangan	Respons strategis
Partisipasi pemuda	Anggota banyak berasal dari pemuda dan karang taruna, tetapi pekerjaan menjadi prioritas setelah mereka lulus sekolah.	Susun program regenerasi, pembagian tugas fleksibel, pelatihan, dan manfaat yang jelas bagi anggota.
Penghijauan	Kegiatan paling berhasil berupa penanaman kelengkeng, jambu, matoa, dan mahoni di kawasan Banyu Langse.	Jadikan konservasi sebagai program inti dan lakukan pemantauan tanaman secara berkala.
Keberlanjutan agenda	Kegiatan terakhir berlangsung sekitar 2020 dan pada 2026 belum terdapat agenda baru.	Tetapkan rencana kerja tahunan, rapat berkala, target sederhana, dan evaluasi kegiatan.
Bantuan dan fasilitas	Bantuan perahu telah rusak, sedangkan kelompok menilai gazebo atau tempat istirahat lebih dibutuhkan.	Lakukan asesmen kebutuhan sebelum pemberian bantuan dan siapkan biaya pemeliharaan.
Riwayat pengembangan	Lokasi mulai dikembangkan pada 2011-2013 dan digunakan untuk KKN, LDKS, kemah, serta pertemuan dari berbagai daerah.	Susun arsip sejarah, peta cerita, dokumentasi foto, dan paket edukasi berbasis bukti.
Prioritas destinasi	Desa Boto memiliki potensi alam, budaya, dan kuliner, tetapi sumber daya pengelolaan masih terbatas.	Pilih satu prioritas yang paling siap, lalu kembangkan potensi lain secara bertahap.

Dream (Membangun Harapan Bersama)

Aspirasi dan Harapan Bersama

Hasil dialog menunjukkan bahwa masyarakat tidak menginginkan pengembangan yang hanya mengejar jumlah kunjungan atau pembangunan fisik. Harapan bersama berpusat pada aktifnya kembali Pokdarwis, keterlibatan pemuda melalui pembagian tugas yang realistis, kawasan yang aman dan terjaga, fasilitas yang sesuai kebutuhan, sejarah lokal yang terdokumentasi secara jujur, serta tumbuhnya usaha warga.

Harapan tersebut dirumuskan menjadi gambaran masa depan Banyu Langse sebagai wisata alam berbasis masyarakat yang tumbuh secara bertahap, mengutamakan keselamatan dan konservasi, serta memberi manfaat langsung bagi warga. Masyarakat juga menghendaki satu prioritas yang paling siap dilaksanakan agar sumber daya tidak terpecah. Rumusan ini menjadi dasar penyusunan strategi dan pembagian peran pemangku kepentingan.

Analisis Pemangku Kepentingan

Pemerintah desa memiliki pengaruh tinggi karena menghubungkan program dengan perencanaan, anggaran, aset, dan kelembagaan. Warga sekitar memiliki kepentingan tinggi karena menerima dampak langsung, walaupun pengaruh formalnya dapat lebih rendah. Karena itu, warga sekitar perlu ditempatkan sebagai mitra inti. Pelaku usaha lokal memiliki kepentingan tinggi pada manfaat ekonomi. Pemerintah kabupaten memiliki pengaruh tinggi untuk pembinaan, standar, akses lintas wilayah, promosi, dan koordinasi teknis. Akademisi dapat membantu pemetaan, sejarah, desain interpretasi, daya dukung, dan evaluasi, tetapi tidak boleh mengambil alih keputusan komunitas.

Kolaborasi perlu dibangun melalui forum dengan agenda dan kewenangan yang jelas. Jamal dan Getz (1995) menekankan proses kolaboratif dalam perencanaan wisata komunitas. Aas et al. (2005) menunjukkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan warisan. Untuk Banyu Langse, forum tidak harus menjadi lembaga baru jika fungsi tersebut dapat dijalankan oleh struktur yang ada. Yang penting, forum mencatat keputusan, konflik kepentingan, tanggung jawab, dan tindak lanjut.

Design (Merancang Strategi)

Tahap Design menerjemahkan aset dan harapan bersama menjadi pilihan strategi yang terukur. Analisis SWOT digunakan untuk menetapkan posisi pengembangan, sedangkan analisis pemangku kepentingan membantu menentukan pihak yang bertanggung jawab, pihak yang perlu dilibatkan, dan bentuk dukungan yang dibutuhkan.

Analisis SWOT dan Posisi Strategis

Analisis SWOT digunakan untuk menyusun pilihan, bukan menggantikan keputusan. Kekuatan utama Banyu Langse ialah daya tarik alam, identitas lokal, kedekatan relatif dari pusat Kabupaten Tuban, akses jalan desa yang baik, jaringan 4G/LTE, dan peluang produk siwalan. Kelemahannya ialah standar keselamatan yang perlu diperkuat, data pengunjung yang belum konsisten, kelembagaan yang perlu dipastikan, narasi sejarah yang belum terdokumentasi, akses terakhir yang perlu diaudit, serta layanan dasar yang terbatas.

Dalam lokakarya, total skor IFAS mencapai 2,74 dan EFAS 2,82 pada skala 1 sampai 4. Nilai tersebut menempatkan Banyu Langse pada posisi yang memiliki kekuatan dan peluang cukup, tetapi belum siap untuk ekspansi agresif. Arah yang tepat ialah pertumbuhan terkendali. Pengelola menguatkan dasar keselamatan dan kelembagaan terlebih dahulu, kemudian meningkatkan produk dan promosi. Strategi ini berbeda dari pola membangun fasilitas besar lalu mencari pengunjung.

Tabel 7. Matriks SWOT Banyu Langse

Faktor internal dan eksternal	Uraian utama
Kekuatan	Air terjun dan lanskap alami; identitas Banyu Langse; akses desa aspal atau beton; jarak relatif dekat dari pusat kabupaten; sinyal 4G/LTE kuat; peluang produk siwalan; modal sosial warga

Faktor internal dan eksternal	Uraian utama
Kelemahan	Standar keselamatan belum terdokumentasi; akses terakhir perlu audit; data pengunjung terbatas; fasilitas dasar belum terukur; narasi sejarah belum diverifikasi; tata kelola dan pembagian manfaat perlu disepakati
Peluang	Minat wisata alam; perjalanan singkat; pemasaran digital; paket edukasi sejarah dan lingkungan; kemitraan kampus; dukungan kebijakan pariwisata berkelanjutan; jejaring destinasi Kecamatan Semanding
Ancaman	Kecelakaan dan cuaca; erosi dan sampah; komersialisasi berlebihan; konflik ruang dan pendapatan; klaim sejarah keliru; kunjungan viral; persaingan; perubahan kualitas dan debit air

Strategi Pengembangan Prioritas

1. Penguatan Kelembagaan dan Akuntabilitas

   Pemerintah desa perlu menetapkan unit pengelola melalui mekanisme yang sesuai dengan status aset, lahan, dan kelembagaan desa. Pilihannya dapat berupa kelompok sadar wisata, unit usaha BUM Desa, kerja sama dengan kelompok masyarakat, atau bentuk lain yang sah. Penentuan bentuk tidak boleh hanya mengejar kemudahan menerima tiket. Bentuk lembaga harus menjelaskan kewenangan, tanggung jawab, hubungan dengan pemerintah desa, pengawasan, serta mekanisme pergantian pengurus.
2. Penataan Keselamatan, Konservasi, dan Daya Dukung

   Audit risiko harus menjadi kegiatan pertama sebelum peningkatan promosi. Tim perlu memeriksa jalur pada musim kering dan musim hujan, mengukur kemiringan, melihat kondisi batu, menandai titik jatuh, memeriksa kestabilan tebing, menilai arus, dan menentukan jangkauan komunikasi. Hasil audit menghasilkan peta bahaya, zona terlarang, titik petugas, perlengkapan, serta kondisi penutupan sementara.
3. Dokumentasi Sejarah dan Interpretasi yang Bertanggung Jawab

   Tim sejarah lokal dapat terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, guru, perangkat desa, dan pendamping. Tim menyusun daftar pertanyaan, merekam wawancara dengan persetujuan, mengumpulkan foto atau dokumen, dan membuat peta cerita. Setiap informasi diberi status verifikasi. Informasi sensitif, sakral, atau terkait kepemilikan tidak dipublikasikan tanpa izin.
4. Pengembangan Usaha dan Manfaat Lokal

   Pengembangan ekonomi perlu dimulai dari rantai belanja pengunjung. Pengunjung membutuhkan transportasi, parkir, pemandu, minuman, makanan, toilet, perlengkapan sederhana, dokumentasi, oleh-oleh, dan penginapan. Pengelola memetakan layanan mana yang sudah tersedia dan siapa yang dapat menjalankannya. Warga mendapat prioritas melalui proses terbuka dan standar yang sama.
5. Pemasaran Digital Berbasis Narasi dan Kesiapan

Pemasaran harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Konten perlu menunjukkan keindahan, tingkat kesulitan, aturan, waktu kunjungan, cuaca, fasilitas, dan produk warga. Foto atau video yang menampilkan perilaku berbahaya tidak boleh dijadikan contoh. Pengelola harus menghindari pesan yang mendorong pengunjung memasuki titik terlarang demi foto.

6. Kemitraan dan Jejaring Destinasi

   Banyu Langse tidak harus bersaing sendiri. Desa dapat membangun paket perjalanan dengan objek lain di Kecamatan Semanding atau Kabupaten Tuban. Paket harus mempertimbangkan waktu, kapasitas, transportasi, dan pembagian manfaat. Jejaring dapat memperpanjang lama tinggal tanpa memusatkan tekanan pada satu lokasi.

Rencana Aksi Bertahap

Rencana aksi memprioritaskan dasar pengelolaan sebelum ekspansi. Fase pertama tidak memerlukan pembangunan besar. Fokusnya ialah keputusan kelembagaan, keselamatan, data, kebersihan, sejarah lisan, dan komunikasi. Fase kedua meningkatkan kualitas layanan dan menghubungkan kunjungan dengan usaha warga. Fase ketiga memperluas jejaring dan standardisasi setelah indikator fase awal tercapai.

Tabel 9. Rencana Aksi Pengembangan Banyu Langse 0 sampai 36 Bulan

Waktu	Program Prioritas	Penanggung Jawab Utama	Indikator Awal
0-3 bulan	Verifikasi status lahan dan aset; pembentukan tim; audit risiko awal; pembersihan terukur; pencatatan pengunjung; pemetaan warga terdampak	Pemerintah desa, BPD, calon pengelola, warga sekitar	Dasar penugasan tersedia; peta bahaya awal; buku kunjungan dan keluhan aktif
3-6 bulan	SOP cuaca dan keselamatan; penanda jalur; pelatihan dasar; dokumentasi sejarah lisan; akun digital resmi; aturan parkir dan sampah	Unit pengelola, tokoh masyarakat, pemuda, mitra teknis	Petugas terlatih; SOP dipasang; minimal tiga cerita terdokumentasi; informasi digital lengkap
6-12 bulan	Perbaikan fasilitas minimum; kurasi produk warga; uji coba pemandu; survei kepuasan; laporan keuangan publik; paket kunjungan terbatas	Pengelola, pelaku usaha, pemerintah desa	Toilet dan jalur memenuhi audit; produk lokal terdaftar; laporan bulanan terbit
12-18 bulan	Paket sejarah dan alam; penguatan homestay; event kecil berkapasitas terbatas; kerja sama sekolah dan komunitas; evaluasi daya dukung	Pengelola, sekolah, UMKM, pemerintah kabupaten	Paket berjalan; belanja lokal tercatat; kejadian keselamatan menurun atau nihil

Waktu	Program Prioritas	Penanggung Jawab Utama	Indikator Awal
18-24 bulan	Jejaring destinasi; standardisasi layanan; pelatihan lanjutan; pembaruan interpretasi; perluasan pemasaran sesuai kapasitas	Desa, kabupaten, mitra destinasi	Kerja sama tertulis; standar layanan diterapkan; ulasan dan kepuasan meningkat
24-36 bulan	Evaluasi dampak sosial ekonomi dan lingkungan; revisi zonasi; rencana investasi selektif; penguatan dana konservasi	Pemerintah desa, pengelola, warga, akademisi	Laporan dampak tersedia; rencana tiga tahun berikutnya disepakati

Destiny/Deliver (Implementasi Awal)

Sosialisasi dan Penyerahan Dokumen Strategi

Pada tahap Destiny/Deliver, hasil pemetaan aset, rumusan harapan bersama, enam strategi prioritas, dan rencana aksi disosialisasikan kepada masyarakat, pengurus Pokdarwis, tokoh lokal, dan pemerintah desa. Sosialisasi menjelaskan alasan pemilihan strategi, urutan prioritas, pembagian peran, tahapan waktu, serta indikator awal. Peserta mendapat ruang untuk memberi koreksi agar isi strategi tetap sesuai dengan kondisi lapangan.

Tim pendamping kemudian menyerahkan dokumen strategi pengembangan Wisata Banyu Langse kepada pemerintah desa dan Pokdarwis sebagai panduan kerja. Dokumen memuat peta aset, hasil analisis SWOT, enam strategi prioritas, rencana aksi 0 sampai 36 bulan, serta indikator monitoring. Implementasi awal diarahkan pada pengaktifan kembali Pokdarwis, verifikasi lahan dan aset, audit risiko, pencatatan pengunjung, dokumentasi sejarah lisan, dan penataan informasi dasar. Pelaksanaan lanjutan memerlukan keputusan resmi pemerintah desa dan kesepakatan warga.

Indikator Monitoring dan Evaluasi

Monitoring perlu dilakukan sejak kunjungan masih sedikit. Data dasar yang tidak dicatat pada fase awal akan sulit direkonstruksi. Pengelola dapat memakai formulir sederhana yang mencatat tanggal, jumlah pengunjung, asal, jenis rombongan, layanan yang digunakan, cuaca, petugas, pendapatan, sampah, insiden, keluhan, dan tindak lanjut. Data pribadi dibatasi sesuai kebutuhan. Pengelola tidak perlu mengumpulkan identitas rinci untuk semua pengunjung.
Indikator dibagi menjadi tata kelola, keselamatan, lingkungan, budaya, ekonomi lokal, pengalaman pengunjung, dan digital. Choi dan Sirakaya (2006) menekankan pendekatan indikator dalam pengelolaan wisata komunitas. Indikator Banyu Langse harus realistis dan dapat diukur oleh pengelola. Banyak indikator yang rumit tetapi tidak pernah diperbarui tidak akan membantu keputusan.

Tabel 10. Indikator Monitoring Banyu Langse

Dimensi	Indikator inti	Frekuensi
Tata kelola	Rapat terlaksana; laporan keuangan; tindak lanjut keluhan; keterwakilan warga	Bulanan dan triwulanan
Keselamatan	Jumlah insiden; kejadian nyaris celaka; kepatuhan SOP; kondisi alat dan jalur	Harian dan bulanan
Lingkungan	Volume sampah; kebersihan jalur; kondisi vegetasi; kualitas air sederhana; titik erosi	Mingguan dan triwulanan
Budaya dan sejarah	Jumlah cerita terdokumentasi; status verifikasi; persetujuan narasumber; pelatihan pemandu	Triwulanan
Ekonomi lokal	Warga terlibat; nilai belanja lokal; pemasok lokal; pendapatan usaha; dana konservasi	Bulanan
Pengunjung	Jumlah kunjungan; kepuasan; keluhan; waktu tinggal; kunjungan ulang	Harian dan bulanan
Digital	Akurasi informasi; waktu respons; jangkauan konten; konversi pertanyaan menjadi kunjungan	Bulanan

PEMBAHASAN

Dukungan warga tidak bersifat tetap. Gursoy dan Rutherford (2004), Lee (2013), serta Nunkoo dan Ramkissoon (2011) menunjukkan bahwa dukungan dipengaruhi persepsi manfaat dan biaya, keterikatan, serta kepercayaan. Wawancara lapangan menunjukkan bahwa dukungan terhadap Banyu Langse masih ada, tetapi partisipasi aktif melemah setelah kegiatan terakhir sekitar 2020. Banyak pemuda lebih memprioritaskan pekerjaan setelah selesai sekolah. Kondisi ini menegaskan bahwa regenerasi pengurus, agenda tahunan, pembagian tugas yang realistis, dan manfaat yang jelas menjadi syarat untuk mengaktifkan kembali Pokdarwis.

Kebutuhan membatasi pembangunan fisik juga sejalan dengan pendekatan keberlanjutan. Saarinen (2006) membahas cara berbeda dalam memahami batas pertumbuhan. Ahn et al. (2002) menawarkan kerangka batas perubahan yang dapat diterima. Penerapannya pada Banyu Langse berarti keputusan didasarkan pada perubahan kondisi jalur, air, vegetasi, sampah, dan pengalaman warga. Daya dukung bukan angka tetap. Nilainya dapat berubah menurut musim, jumlah petugas, dan kualitas fasilitas.

Pengembangan ekonomi lokal perlu menghindari kebocoran manfaat. Pemberdayaan harus mencakup dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan politik (Scheyvens, 1999). Sebele (2010) mencatat bahwa usaha wisata berbasis komunitas dapat memberi manfaat sekaligus menghadapi tantangan. Salazar (2012) juga mengingatkan adanya ancaman dalam wisata budaya berbasis komunitas. Kebijakan prioritas kios warga, pemandu lokal, produk siwalan, transportasi lokal, dan penginapan dapat mengurangi kebocoran. Namun, kualitas tetap harus dijaga melalui pelatihan, kurasi, dan evaluasi pelanggan.

Kemitraan menjadi penting karena desa tidak memiliki semua keahlian. Byrd (2007) menekankan peran pemangku kepentingan, sedangkan Jamal dan Getz (1995) menempatkan kolaborasi sebagai proses untuk mencapai keputusan bersama. Pengalaman bantuan perahu yang kini rusak menunjukkan bahwa bantuan tidak cukup dinilai dari nilai barang. Kesesuaian kebutuhan, kemampuan merawat, biaya operasional, dan fungsi jangka panjang harus diperiksa terlebih dahulu. Kemitraan berikutnya perlu mendahulukan asesmen kebutuhan warga, termasuk kebutuhan fasilitas istirahat seperti gazebo, dukungan konservasi, dokumentasi sejarah, penguatan usaha lokal, dan pemasaran.

Keberhasilan Banyu Langse tidak perlu diukur dari menjadi destinasi paling ramai. Ukuran yang lebih relevan ialah tidak adanya kecelakaan yang dapat dicegah, lingkungan yang terjaga, warga yang menerima manfaat, cerita lokal yang terdokumentasi dengan jujur, pengunjung yang puas, dan lembaga yang dipercaya. Pendekatan ini membuat pertumbuhan menjadi hasil dari kualitas, bukan tujuan tunggal.

KESIMPULAN

Banyu Langse memiliki dasar yang layak untuk dikembangkan sebagai wisata alam berbasis masyarakat. Daya tarik air terjun, lanskap perdesaan, cerita lokal, akses jalan desa, dan dukungan jaringan digital menjadi kekuatan utama. Wawancara lapangan menunjukkan bahwa Pokdarwis telah dirintis sekitar 2014 dengan keterlibatan pemuda dan karang taruna. Kegiatan penghijauan menjadi capaian yang paling nyata, tetapi agenda rutin berhenti sekitar 2020. Regenerasi pengurus, kesibukan kerja pemuda, ketidaksesuaian bantuan, dan belum adanya prioritas program menjadi kendala utama.

Pendampingan dengan pendekatan ABCD menghasilkan peta aset pada tahap Discovery, rumusan harapan bersama pada tahap Dream, enam strategi prioritas dan rencana aksi pada tahap Design, serta sosialisasi dan penyerahan dokumen strategi pada tahap Destiny/Deliver. Enam strategi tersebut meliputi penguatan kelembagaan dan akuntabilitas, penataan keselamatan dan konservasi, dokumentasi sejarah dan tradisi lisan, pengembangan usaha warga, pemasaran digital berbasis narasi, serta kemitraan lintas pihak. Riwayat pengembangan sejak 2011-2013, pemanfaatan lokasi untuk KKN, LDKS, kemah, dan pertemuan, serta pengalaman penghijauan perlu didokumentasikan sebagai modal sosial. Pelaksanaan perlu dimulai dari pengaktifan kembali Pokdarwis, penyusunan rencana kerja tahunan, asesmen kebutuhan fasilitas, audit keselamatan, dan penetapan satu prioritas destinasi yang paling siap.

DAFTAR PUSTAKA

Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. Annals of Tourism Research, 32(1), 28-48. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.005

Ahn, B. Y., Lee, B. K., & Shafer, C. S. (2002). Operationalizing sustainability in regional tourism planning: An application of the limits of acceptable change framework. Tourism Management, 23(1), 1-15. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00059-0

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. (2024). Kecamatan Semanding dalam angka 2024. BPS Kabupaten Tuban. https://tubankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/dd683283c88e32aed28efd3e/kecamatan-semanding-dalam-angka-2024.html

BeritaBojonegoro.com. (2017, 16 Maret). Menikmati keindahan Air Terjun Banyu Langse di Desa Boto. BeritaBojonegoro.com.

Byrd, E. T. (2007). Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: Applying stakeholder theory to sustainable tourism development. Tourism Review, 62(2), 6-13. https://doi.org/10.1108/16605370780000309

Choi, H. S. C., & Sirakaya, E. (2006). Sustainability indicators for managing community tourism. Tourism Management, 27(6), 1274-1289. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.05.018

Fauzi, A., Lubab, A., & Khoirul Abidin, U. (2024). Menyiapkan akreditasi program studi APS 4.0 dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 86-90. https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7036

Gursoy, D., & Rutherford, D. G. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model. Annals of Tourism Research, 31(3), 495-516. https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.08.008

Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. Annals of Tourism Research, 22(1), 186-204. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-3

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. The Asset-Based Community Development Institute, Institute for Policy Research, Northwestern University.

Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism Management, 34, 37-46. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.007

Nunkoo, R., & Ramkissoon, H. (2011). Developing a community support model for tourism. Annals of Tourism Research, 38(3), 964-988. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.01.017

Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. Journal of Sustainable Tourism, 16(5), 511-529. https://doi.org/10.1080/09669580802159594

Pemerintah Kabupaten Tuban. (2019, 13 Februari). Wabup "Ngobras" bareng wartawan di Wahana Wisata Air Terjun Banyu Langse, Desa Boto. Pemerintah Kabupaten Tuban. https://tubankab.go.id/entry/wabup-ngobras-bareng-wartawan-noor-ingatkan-jika-ada-keluhaan-masyarakat

Poria, Y., Butler, R., & Airey, D. (2003). The core of heritage tourism. Annals of Tourism Research, 30(1), 238-254. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00064-6

Ruiz-Ballesteros, E. (2011). Social-ecological resilience and community-based tourism: An approach from Agua Blanca, Ecuador. Tourism Management, 32(3), 655-666. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.05.021

Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. Annals of Tourism Research, 33(4), 1121-1140. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.06.007

Salazar, N. B. (2012). Community-based cultural tourism: Issues, threats and opportunities. Journal of Sustainable Tourism, 20(1), 9-22. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.596279

Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20(2), 245-249. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7

Sebele, L. S. (2010). Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana. Tourism Management, 31(1), 136-146. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.01.005